

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Survei Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan peran perempuan sebagai kepala desa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Kusnandar, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan riset di level daerah. Hasil Pilkada 2020 menunjukkan persentase tertinggi keterpilihan perempuan dengan angka sebesar 11,02% (Cakra Wikara, 2021). Angka ini bak angin segar yang menggembirakan, pertanda semakin hari ada semakin banyak perempuan yang turut serta dalam kontestasi politik. Pada hakikatnya, perempuan sama halnya dengan laki-laki. Negara menjamin kemerdekaan partisipasi politik setiap orang untuk memilih ataupun dipilih asalkan memenuhi syarat yang ditentukan. Namun sayangnya, ada sebagian orang yang masih beranggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Derap langkah perempuan di ranah politik dipandang sebagai upaya melanggar kodrat (Elizabeth, 2018). Anggapan semacam ini masih banyak terpelihara dalam kultur masyarakat desa yang hidup dengan nilai-nilai tradisional, di mana nuansa budaya patriarki masih sangat kentara (Sulistyo, 2019). Faktor inilah yang menjadi hambatan terbesar bagi seorang perempuan untuk berkontestasi di level politik *grassroots*.

Di tengah besarnya hambatan yang mengiringi, di Kabupaten Pemalang terdapat 4 kades perempuan yang terpilih dari hasil Pilkades serentak 2018. Mengacu pada SK Bupati Pemalang No. 141/1161 s/d 1279/2018, salah satu dari

keempat orang tersebut adalah Purwati sebagai Kepala Desa Pamutih. Ia tampil sebagai pemenang kontestasi Pilkades Pamutih 2018 dengan perolehan suara sebesar 57,36% dan berhasil mengalahkan 2 kandidat lainnya yang berjenis kelamin laki-laki, di mana salah satunya adalah petahana. Pamutih merupakan desa dengan jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Ulujami pada Gelombang VIII Pilkades serentak Kabupaten Pematang Jaya 2018. Terdapat 6.103 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Hal yang menarik dari kemenangan Purwati adalah ia tidak tinggal di Pamutih setelah menikah karena ikut mengurus bisnis bersama suaminya di Comal. Purwati baru menetap kembali di Pamutih ketika menjelang rangkaian kontestasi Pilkades dimulai. Dalam rentang waktu itu pula, ia tidak aktif tergabung maupun terlibat di dalam organisasi dan kegiatan kemasyarakatan. Padahal, menurut Poplin (1972), nilai kekeluargaan, kesatuan kultural, dan adanya kolektivisme menjadi corak utama tata kehidupan di desa (Beta, 2018). Beberapa karakteristik ini mengandung konsekuensi bahwa seorang kandidat kepala desa harus membangun kedekatan dalam jangka waktu yang tidak instan jika ingin merebut hati masyarakat dan memenangkan kontestasi. Berjaraknya Purwati dari konstituen di waktu sebelum rangkaian Pilkades dimulai memunculkan satu *gap* dengan hasil kemenangannya.

Masih dalam konteks Pilkades Serentak Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018, di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, juga menyuguhkan dua kandidat perempuan yang berkontestasi bersama dengan dua kandidat laki-laki. Namun sayangnya, kedua kandidat perempuan tersebut memperoleh suara yang sangat

rendah dan memiliki selisih yang signifikan dengan dua petarung lainnya. Selain Purwati, Kandidat perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi adalah Wiwin Widiretno dari Desa Banjaran dan Musiyam dari Desa Sitemu. Namun, berbeda dengan Purwati, keduanya harus bersaing secara ketat yang dibuktikan dengan selisih suara tidak begitu timpang (Sugiharto, Eldo, & Artiningrum, 2020). Musiyam adalah satu-satunya petahana perempuan yang kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Sitemu.

Dalam temuan yang lain, majunya calon kepala desa perempuan kerap dijadikan sebagai “boneka”, terutama ketika suaminya turut serta dalam kontestasi. Seperti yang terjadi di Demak pada tahun 2016, perhelatan Pilkades disemarakkan dengan partisipasi 17 pasangan suami istri. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya rivalitas semu antara suami dan istri dalam Pilkades (Astuti, Sulistyowati, & Astrika, 2019). *Pertama*, berkontestasi dengan istri dianggap sebagai rival yang tidak memerlukan biaya kompensasi dan memiliki risiko konflik kepentingan yang lebih rendah di masa mendatang. *Kedua*, dengan menempatkan istri sebagai rival, peluang keterpilihan sang suami semakin besar karena masih banyak desa yang memegang tradisi Islam dan nilai-nilai patriarki. Mereka cenderung lebih suka menganalogikan perempuan sebagai makmum.

Standing penelitian ini melihat ada jaringan berpengaruh yang menyokong kemenangan Purwati sehingga mampu membangun modalitas ataupun faktor lain yang berperan signifikan dalam meraup suara masyarakat. Menurut riset yang dilakukan oleh Aspinall, sebagian besar jenis jejaring sosial memang dapat ditransformasikan menjadi modal politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Nampak

mustahil bagi satu-satunya kandidat perempuan untuk dapat memenangkan kontestasi apabila tidak didukung jaringan yang membantu pemenangnya. Terlebih yang menjadi rivalnya adalah petahana laki-laki dan satu kandidat laki-laki lainnya sebagai penantang baru. Logikanya, hambatan bagi seorang perempuan untuk terjun dalam dunia politik saja sudah begitu besar. Ditambah lagi Purwati tidak memiliki investasi sosial yang memadai karena ia tidak tinggal di Pamutih setelah menikah. Investasi sosial dapat dibangun atas dasar kesukarelaan ataupun dalam rangka menjalankan tugas (Lin, 2004). Merujuk pada pengistilahannya dalam tajuk ‘investasi’, tentu dapat disepakati bahwa hubungan sosial ini dipelihara dalam jangka waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, dari sinilah penulis membangun argumen bahwa jaringan yang ada di balik Purwati memiliki andil besar untuk menjembatani kandidat perempuan dengan konstituen dan akses ke sumber daya kemenangan.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kemenangan kandidat perempuan dalam kontestasi di ranah lokal dilatarbelakangi oleh menguatnya faktor kekerabatan (Perludem, 2019). Fenomena ini memiliki kesamaan makna dengan istilah *familial ties*, yang merujuk pada kondisi di mana perempuan politisi menggantungkan keberhasilan karir politiknya dengan faktor kekerabatan (Richter, 1990 - 1991). Kerabat politisi laki-laki seperti ayah, suami, kakak, dan adik mereka memiliki pengaruh kuat untuk memfasilitasi kemunculan dan kemenangan kontestasi politik kandidat perempuan. Faktor ini dinilai mampu menutup kekurangan yang ada pada diri politisi perempuan seperti minimnya pengetahuan, kurangnya pengalaman politik, dan keterbatasan akses. Dalam konsep teori

housewifization atau pengiburumahtangaan dari Maria Mies, ideologi gender menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak produktif (Suryakusuma, 2021). Akibatnya, perempuan dipandang sebagai makhluk heteronom. Ia berada dalam posisi subordinat dalam hubungannya dengan laki-laki, sehingga turut berimbas secara luas dalam konteks sosial dan politik.

Sebagai contoh, kemenangan elektoral para istri kepala daerah di Sumatera Barat pada Pemilu Legislatif 2019 dominan disokong oleh sumber daya politik suami mereka. Mereka juga menggunakan berbagai jaringan politik untuk menjangkau para pemilih, dengan cara yang menekankan pada peran gender tradisional dan perpaduan citra gender modern atau yang disebut sebagai *neo-ibuisme* (Kabullah & Fajri, 2021). Bergeser ke NTT, salah satu legislator yang berhasil menduduki kursi DPRD bahkan mengemukakan bahwa kemenangannya lebih banyak disebabkan oleh nama besar ayahnya sebagai seorang politisi, bukan karena dirinya pribadi (Dalupe, 2020). Faktor yang menyokong kemenangan tersebut didasarkan pada jaringan personal dan kekerabatan yang dominan dimotori oleh laki-laki.

Selain itu, ada juga istilah yang disebut sebagai familisme. Kasus bertahannya dinasti Ratu Atut setelah ia dan adiknya ditangkap KPK dapat digambarkan melalui kerangka *octopussy dynasty*. Dinasti Ratu Atut tidak dapat dilepaskan dari ketokohan ayahnya, Tubagus Chasan Sohib. Ia merupakan *local strongman* di Banten yang kemudian membentuk akar dinasti dengan sangat kuat karena pengaruh sosial, politik, dan ekonomi yang dimiliki (Sukri, 2020). Kasus terpilihnya Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, Bupati Bantul Sri Suryawidati,

dan Bupati Indramayu Ana Sophanah yang masing-masing menggantikan posisi suaminya sebagai kepala daerah juga merupakan bentuk familisme berbasis populisme yang disokong jaringan lama pada kemenangan suaminya dahulu (Djati, 2013). Singkatnya, beberapa temuan riset di atas menunjukkan bahwa kandidat perempuan yang ingin berhasil memenangkan kontestasi untuk jabatan publik secara signifikan akan diuntungkan jika mereka berasal dari dinasti politik dan memiliki jaringan kekerabatan yang besar serta efektif.

Namun demikian, beberapa temuan riset lain menunjukkan hasil yang berbeda. Kunci sukses keterpilihan kandidat perempuan lebih ditekankan pada ketersediaan akses ke jaringan besar di organisasi yang mau dan mampu menyediakan modal sosial yang dibutuhkan kandidat, dan bisa digunakan sebagai mesin politik untuk mendukung kampanye mereka. Seperti halnya fenomena terpilihnya lima kandidat perempuan legislatif di DPRD Jawa Tengah yang menggunakan peranan jaringan Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikah, 2021). Sejalan dengan temuan ini, kemenangan *hattrick* yang diraih oleh Een Rusmiyati dalam menempati kursi DPRD Cirebon untuk ketiga kalinya dilatarbelakangi oleh berjalannya tugas perawatan konstituen dengan baik, meskipun Een bukan berasal dari dinasti politik manapun (Muzadi & Fitriyah, 2020). Tentu saja, untuk memaksimalkan tugas ini Een tidak sendirian. Ia dibantu oleh jaringan dan tim sukses yang sangat loyal. Begitupun kemenangan yang diraih oleh Tjhai Chui Mie pada Pilkada 2017 sebagai perempuan Tionghoa pertama yang menjadi Walikota Singkawang. Bukan faktor jaringan kekerabatan dinasti yang memengaruhi kemenangannya, tetapi justru andil jaringan etnisitas, keagamaan,

dan organisasi pengusaha Tionghoa yang menunjang modal sosialnya (Kartika, Rahmatunnisa, & Yuningsih, 2018). Dalam konteks kemenangan Sri Sumarni yang menjadi Bupati Grobogan dua periode, kesuksesan kontestasinya juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting jaringan kepala desa dan jaringan petani (Dewi, Kusumaningtyas, Ekawati, & Soebhan, 2018).

Berdasarkan data-data dan uraian di atas, terdapat beragam jenis jaringan yang dapat menyokong kemenangan kandidat perempuan dalam sebuah kontestasi elektoral di berbagai level. Penelitian ini akan berfokus menganalisis kondisi dan klasifikasi jaringan pemenangan yang digunakan oleh Purwati untuk memenangkan Pilkades Pamutih 2018. Sebab, jaringan ini tentu memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesannya memenangkan Pilkades Pamutih 2018, karena ia tidak tinggal di Pamutih sebelum masa kontestasi dimulai. Selain itu, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, peneliti juga ingin menganalisis bagaimana cara kandidat perempuan tersebut membangun jaringan sehingga mampu mengantarkannya menjadi salah satu kepala desa perempuan di Kabupaten Pemalang.

Tulisan ini akan memperkaya studi terdahulu yang belum menyorot secara spesifik bagaimana potret jaringan pemenangan yang membantu kemenangan kandidat perempuan pada kontestasi di tingkat *grassroots*, seperti dalam perhelatan Pilkades. Hasil penelitian sebelumnya lebih banyak melihat jaringan pemenangan kandidat perempuan di level pemilihan yang luas, seperti daerah kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional, baik di lingkup kontestasi eksekutif maupun legislatif. Padahal, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, perpaduan antara *self governing community* dengan *local self government* yang memiliki dinamika politik tersendiri (Eko, 2014). Maka dari itu, sudah semestinya kontestasi elektoral di tingkat desa dalam wujud Pilkades layak mendapatkan *spotlight*, baik dalam lingkup politik praktis maupun perkembangan teoritis (Mardhika, Martini, & Fitriyah, 2021). Majunya kandidat perempuan dalam level kontestasi ini juga perlu dilihat sebagai aspek yang penting karena dapat membumikan wacana kesetaraan gender yang dimulai dari tataran *grassroots*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan difokuskan ke dalam satu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi jaringan pemenangan Purwati dalam Pilkades Pamutih 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi jaringan pemenangan kandidat perempuan (Purwati) dalam Pilkades Pamutih 2018, yang meliputi kondisi jaringan, klasifikasi jejaring, dan strategi berjejaring.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara garis besar terbagi atas dua hal, yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, terutama kajian akademis mengenai jaringan pemenangan yang digunakan oleh kandidat perempuan di lingkup kontestasi berskala lokal pada tataran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai strategi yang digunakan kandidat perempuan dalam membangun jaringan pemenangan di Pilkades. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang bertema serupa dan dikembangkan secara lebih komprehensif di kemudian hari.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui realitas secara konkrit tentang jaringan yang menyokong kemenangan kandidat perempuan dalam Pilkades Pamutih 2018. Penulis juga menjadi tahu tentang strategi seperti apa yang digunakan oleh kandidat perempuan tersebut dalam membangun jaringan. Nantinya, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi serta evaluasi bagi majunya kandidat perempuan dalam medan kontestasi politik agar memiliki modalitas yang memadai, baik dari sisi internal maupun eksternal.

1.5. Landasan Pemikiran Teoritis

1.5.1. Jaringan dalam Kontestasi Politik

Studi tentang jaringan menekankan pembahasan pada dua aspek penting yang menjadi kunci utama, yakni adanya aktor dan relasi (Eriyanto, 2014). Aktor

yang dimaksud bukan hanya merujuk pada individu secara personal, tetapi juga mencakup komunitas, organisasi, lembaga, korporasi, negara, dan lain sebagainya. Kemudian, relasi yang terbangun di antara para aktor disebut *link (edge)*. Ada satu analogi menarik yang dapat menjelaskan konsep ini. Jika aktor adalah sebuah titik, maka *link* merupakan sebuah garis yang menjembatani setiap titik tersebut. Studi tentang jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Berfokus pada relasi antar aktor; (2) Tidak berfokus pada data agregat, tetapi lebih menyorot data individu tiap aktor; (3) Posisi aktor ditentukan oleh keberadaan aktor lainnya; dan (4) Relasi aktor dilihat secara struktural. Dengan demikian, jaringan dapat didefinisikan sebagai keterhubungan antar aktor yang dilandasi atas kesepahaman kepentingan tertentu, sehingga terjalin relasi interdependensi di antara masing-masing aktor untuk mencapai kepentingan itu.

Jaringan dalam kontestasi politik merupakan penopang modalitas bagi seorang kandidat. Tanpa adanya jaringan, sangat sulit bagi kandidat untuk terhubung dengan konstituen mereka. Calon pemilih yang jumlahnya banyak tidak mungkin didekati satu per satu oleh kandidat. Sehingga, mereka memerlukan jaringan sebagai jembatan yang menghubungkan dirinya dengan calon pemilih. Para peserta kontestasi elektoral kerap memanfaatkan jaringan untuk menjadi alat politik yang mampu memobilisasi pemilih, kemudian mereka berusaha dengan keras untuk mengintegrasikan jaringan tersebut dalam tim kampanye (Aspinall & As'ad, 2015). Masyarakat diposisikan selayaknya pasar, dimana orang-orang bertukar semua jenis barang dan ide untuk mengejar kepentingan mereka. Logika bekerjanya jaringan dalam kontestasi politik semacam ini memunculkan pola relasi

yang sifatnya transaksional. Oleh karena itu, kandidat sering berlomba-lomba memanfaatkan jaringan apapun yang bisa diikat dengan pertukaran, entah itu berupa perlakuan khusus ataupun pemenuhan kebutuhan tertentu yang mereka minta (Tilly, 2005).

Dasar dari relasi yang terbangun antar aktor dalam jaringan adalah rasa saling percaya (Biggart, 2000). Kepercayaan inilah yang kemudian memunculkan semacam kontrol sosial, keintiman, dan kewajiban balas jasa. Sehingga, menjadi hal yang rasional apabila berbagai macam jejaring dapat ditransformasikan menjadi modal politik. Jaringan mengambil peran yang memfasilitasi relasi klientelistik antara kandidat dengan calon pemilih. Mekanisme bekerjanya jaringan politik umumnya adalah individu terhubung satu sama lain terlebih dahulu secara bervariasi sebagai fungsi dari interaksi sebelumnya, lalu muncul semacam “kontrak pertukaran” yang disepakati.

Selanjutnya, jaringan yang terbagi lagi menjadi sub-jaringan memainkan peran mereka untuk mendistribusikan sejumlah manfaat dari kandidat kepada masyarakat. Jaringan juga memegang peran krusial untuk mempromosikan kandidat kepada calon pemilih, baik melalui sosialisasi ataupun pemberian manfaat langsung. Sekurang-kurangnya, jaringan politik harus paham tentang tujuan kandidat dan kebutuhan masyarakat agar dapat disinkronkan dan perannya bisa berjalan dengan baik. Karena perannya yang sangat strategis inilah jaringan turut dimaknai sebagai dasar untuk bekerja pada modal sosial (Coleman, 1990). Setiap orang terhubung sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa luput dari perhatian orang lain, yang dalam istilah operasional disebut sebagai jaringan yang padat dan

dianggap sebagai sumber modal sosial. Pierre Bourdieu turut mengemukakan bahwa jaringan merupakan konstruksi dari modal sosial, di mana keuntungan yang dimiliki oleh individu atau kelompok didapatkan dari posisi mereka dalam struktur sosial (Bourdieu & Wacquant, 1992)

Ronald S. Burt menjelaskan tentang struktur jaringan yang membentuk modal sosial, di antaranya adalah *Network Models of Contagion*, *Network Models of Prominence*, dan *Network Models of Range* (Burt, 2000). Model pertama melihat bahwa satu perilaku individu yang dapat diamati dengan baik dapat diambil sebagai sinyal yang menunjukkan perilaku jaringan. Dalam hal ini, informasi yang beredar tidak diposisikan sebagai *clear guide* untuk menggambarkan karakteristik jaringan secara keseluruhan. Pada model kedua, kualitas dan sumber daya jaringan dapat dibaca dari keunggulan individu atau kelompok yang menonjol.

Sedangkan model ketiga membagi lagi struktur jaringan menjadi dua, yakni *Closure* dan *Brokerage*. Struktur jaringan tertutup atau *Closure* memiliki keunggulan kompetitif yang berasal dari proses manajemen risiko. Struktur jaringan tertutup mampu meningkatkan komunikasi dan penegakan sanksi karena risiko yang muncul diasumsikan dapat terminimalisir dari rasa saling percaya. Berikutnya, struktur jaringan perantara atau *Brokerage* memiliki keunggulan kompetitif yang berasal dari akses informasi dan kontrol. Struktur jaringan *Brokerage* digambarkan mampu menjangkau *structural holes* dan menyediakan akses yang luas serta dekat ke pengendalian informasi. Orang-orang di kedua sisi *structural holes* bersirkulasi dalam aliran informasi yang berbeda. Dengan demikian, celah di antara kedua sisi aktor merupakan kesempatan untuk menengahi

arus informasi dan mengendalikan serta menyatukan orang-orang dari kedua sisi yang berlawanan. Dalam konteks seperti inilah sebenarnya jaringan politik memainkan peran. Untuk memenangkan kandidat yang berkompetisi pada panggung politik, jaringan bekerja dengan membagi lagi menjadi sub-jaringan yang biasa dikenal dengan istilah tim sukses, makelar politik, *broker*, *pecut*, atau istilah sejenis

Ada beragam jenis jaringan yang dapat menyokong kemenangan seorang kandidat dalam kontestasi politik. Para politisi tidak begitu suka mengadopsi wacana yang sifatnya konfliktual dan berpotensi memunculkan sekat antara *kita* dengan *mereka*. Sebaliknya, mereka berlomba-lomba membangun kedekatan dengan organisasi atau kelompok yang memiliki pengaruh di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya banyak jaringan lintas sektoral yang dapat dijadikan sebagai alternatif mobilisasi politik. Seperti melalui jaringan keagamaan, organisasi profesi, serikat pekerja, kelompok tani, klub olahraga, komunitas hobi, hingga memanfaatkan keberadaan orang-orang yang kurang diperhitungkan seperti preman, penjudi, dan pelacur. Secara garis besar, tipe jaringan itu dibedakan menjadi dua, yakni jejaring pengaruh dan jejaring manfaat (Aspinall & Berenschot, 2019). Penjelasannya akan diuraikan dalam narasi di bawah ini.

1. Jejaring Pengaruh

Aspinall mendefinisikan jejaring pengaruh sebagai orang-orang yang dapat memengaruhi preferensi publik dalam kelompok mereka secara masif, di mana terdapat faktor ketokohan dan loyalitas yang melekat kuat karena peranan modal kultural dan fungsi sosial. Jaringan jenis ini memiliki eksistensi identitas

yang nampak secara nyata. Derajat pemahaman yang tinggi mengenai keagamaan, status keluarga, peran tradisional, hingga keahlian atau keterampilan tertentu di bidang olahraga, seni, maupun budaya, merupakan beberapa bentuk modal kultural yang memiliki legitimasi dalam masyarakat dan memainkan fungsi sosial (Aspinall & Berenschot, 2019). Orang-orang ini dijadikan semacam percontohan. Segala tindakan mereka tidak terlepas dari pengamatan masyarakat. Sehingga, apa yang mereka utarakan dan perilaku yang ditampilkan dapat menggerakkan masyarakat, termasuk dalam aspek mobilisasi politik atau keberpihakan terhadap kandidat dan preferensi politik tertentu.

Contoh nyata dari jejaring pengaruh adalah organisasi keagamaan. Secara historis, organisasi-organisasi keagamaan telah memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika politik di Indonesia. Tokoh keagamaan terbukti memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat, karena mereka memegang fungsi untuk menyebarkan ajaran kitab suci. Berjalannya tugas pembimbingan ini membuat mereka mempunyai pengikut dalam jumlah besar. Masifnya komunitas-komunitas berbasis agama seperti perkumpulan jamaah masjid, mushola, gereja, kelompok sembahyang, atau dalam bentuk lembaga pengajian, sekolah keagamaan, serta lain sejenisnya, merupakan bukti besarnya peluang mobilisasi massa. Para politisi melihat tokoh-tokoh agama sebagai figur yang mampu memberikan akses kepada calon konstituen. Bahkan, dalam survei yang dilakukan terhadap 509 pengamat politik di Indonesia, temuan Aspinall dan Berenschot menempatkan pemuka agama di posisi pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh untuk menaikkan reputasi kandidat dan memengaruhi pilihan masyarakat.

Dalam konteks Islam, organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki cabang jejaring hingga tingkat akar rumput biasanya menjadi pemain yang tidak absen mengisi hiruk pikuk kontestasi. Setiap kandidat berusaha mendekati petinggi-petinggi NU atau Muhammadiyah dan berusaha menjalin kedekatan agar diberikan akses ke massa untuk kepentingan kampanye mereka. Pun sama dengan wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen seperti di Sulawesi Utara. Para kandidat berusaha membangun koneksi dengan gereja, persekutuan, pengkhotbah, atau berbagai alternatif akses lainnya yang dapat dijangkau (Rubaidi, 2016).

Berikutnya, contoh lain dari jejaring pengaruh adalah jaringan etnisitas. Meskipun sifat dari jaringan etnisitas sangatlah cair, tetapi komponen ini menjadi salah satu elemen yang masih diperhitungkan dalam lingkungan masyarakat. Pengaruh tokoh adat atau pemuka masyarakat di kalangan komunitas mereka tergolong cukup besar untuk mempromosikan seorang kandidat (Davidson & Henley, 2017). Peran yang sama juga dimainkan oleh petinggi klan seperti pemimpin marga atau *fam*. Hal tersebut muncul karena pemuka masyarakat memegang tugas-tugas yang berhubungan dengan mediasi dan rekonsiliasi konflik, memimpin upacara atau ritual tertentu, serta menjadi wakil dari masyarakat setempat apabila ada kegiatan di luar. Peran yang cenderung krusial untuk memainkan fungsi sosial. Biasanya, seorang calon akan mendekati pemimpin etnis secara kekeluargaan, lalu berusaha masuk dengan memberikan hadiah yang secara kultural dianggap pantas sebagai simbolisasi. Para kandidat percaya bahwa melalui petinggi etnis, mereka dapat memperoleh suara bergepok-gepok banyaknya tanpa

berkewajiban mendatangi masyarakat secara lebih intensif. Kalaupun dalam kondisi terburuk tidak memperoleh suara yang signifikan, seorang kandidat meyakini setidaknya ada nilai kepantasan dan kesopanan yang mereka jalankan jika membangun kedekatan dengan etnisitas melalui pemimpinnya. Dalam istilah Jawa dikenal dengan agenda *sowan*.

2. Jejaring Manfaat

Jejaring manfaat merupakan jenis jaringan yang memegang peranan besar untuk memenuhi tujuan masyarakat secara ril dalam mendapatkan potensi pemasukan, pekerjaan, ataupun aspek material lainnya karena faktor modal finansial dan fungsi ekonomis (Aspinall & Berenschot, 2019). Lebih lanjut, Pada konteks masyarakat yang relatif homogen, ada kekuatan ekonomi (*material*) sebagai salah satu sumber daya kekuasaan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap upaya pemenangan seorang kandidat (Fathudin, Thamrin, & Ihya, 2020). Persaingan akan cenderung berjalan sengit antara calon yang memiliki akumulasi modal ekonomi besar, sehingga dengan modal itulah mereka berusaha memobilisasi calon pemilih.

Contoh konkrit dari jejaring manfaat adalah wakil pemerintah yang ada di masyarakat, atau dapat kita sederhanakan penyebutannya sebagai pejabat publik. Manfaat yang didistribusikan mereka dalam konteks ini adalah akses ke sumber daya negara. Pada tataran kontestasi elektoral di tingkat daerah, para birokrat dan kepala desa merupakan contoh jejaring manfaat yang cukup sentral peranannya. Bagaimana tidak, mereka memiliki intensitas interaksi dengan masyarakat cukup luas dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat, seperti melaksanakan fungsi

konsultatif, menyediakan pelayanan publik, serta menjadi negosiator pengambilan keputusan di beberapa aspek. Sedangkan pada tataran kontestasi di tingkat *grassroots* di mana jabatan kepala desa dikompetisikan, perangkat desa dan ketua RT/RW merupakan representasi dari jejaring manfaat. Mereka memegang akses pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, layanan kesehatan, hingga *lobbying* informal untuk memengaruhi *stakeholders* tentang siapa saja yang bisa menerima bantuan, subsidi pemerintah, dan sejenisnya. Maka, menjadi wajar manakala seorang kandidat berusaha keras untuk memasukkan mereka ke dalam jaringan pemenangan, meskipun secara etika seharusnya pejabat publik dituntut untuk menjaga netralitas.

Contoh lain bentuk jejaring manfaat yang paling sering dijumpai adalah jaringan yang dibangun dari aktivitas ekonomi. Jaringan perdagangan dan serikat pekerja merupakan ladang basah untuk meraup suara. Peran pimpinan dalam komunitas atau industri tersebut sangatlah besar. Ia memegang kendali atas pekerja-pekerja di bawahnya dan mitra yang telah menjalin kerja sama. Pada contoh jaringan petani, baik itu padi, kopi, cengkeh, dan lain-lain, seringkali bergantung pada mereka yang memiliki akses luas ke sektor pasar dan mau membeli komoditas yang sudah dipanen.

Para petani juga kerap bergantung pada subsidi pemerintah. Akibatnya, kerentanan ini dimanfaatkan kandidat untuk memobilisasi pekerja melalui jejaring ekonomi, baik dimobilisasi secara langsung ataupun lewat perantara. Sama halnya dengan apa yang terjadi di masyarakat pesisir. Rentenir dan pemilik perahu bisa dengan mudah menyuruh bawahan-bawahan mereka untuk memilih kandidat yang

didukungnya (Haryanto, 2017). Bahkan, dalam beberapa kasus, bujukan semacam ini kerap diselimuti berbagai ancaman yang membuat pekerja rentan tidak memiliki pilihan lain.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, jaringan memiliki sub-jaringan yang lebih terperinci untuk melakukan kerja lapangan atau eksekusi pemenangan kandidat. Sub-jaringan inilah yang biasa dikenal dengan istilah tim sukses atau *broker*. Setiap kandidat memerlukan tim sukses untuk menjangkau pemilih secara lebih dekat setelah membangun jaringan pemenangan yang solid. Karakteristik tim sukses yang paling dibutuhkan biasanya adalah mereka yang memiliki lingkungan pergaulan luas dan pengetahuan mendalam tentang komunitas lokal, mempunyai pengaruh dalam komunitas itu, serta tersedianya khalayak yang dapat ditarik ke dalam tim kampanye.

Namun, hal yang menjadi masalah adalah tidak semua *broker* akan setia kepada jaringan di atasnya atau tuan politik mereka. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa pekerja kampanye seringkali dimotivasi oleh imbalan materi, dan jaringan perantara yang memberikan imbalannya bersifat sangat tidak stabil (Aspinall & Berenschot, 2019). *Broker* memiliki otonomi yang cukup besar untuk melaksanakan tugasnya. Kepatuhan pada tuan politik disesuaikan dengan motif dan peluang untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Mereka bisa menjadi loyalis yang setia, memanfaatkan sumber daya, atau bahkan berkhianat dengan berpindah ke kandidat lawan tuannya. Aspinall dan Berenschot kemudian membagi tipologi *broker* ke dalam tiga jenis, yakni *activist brokers*, *clientelist brokers*, dan *opportunist brokers*. Penjelasan mengenai ketiganya adalah sebagai berikut.

a. *Activist Brokers*

Broker aktivis adalah mereka yang mendukung seorang kandidat berdasarkan loyalitas penuh dan afiliasi politik. Biasanya, mereka berasal dari ikatan kekerabatan, agama, etnis, atau komitmen politik tertentu yang orientasinya jauh dari kalkulasi imbalan materi. Jenis *broker* ini adalah tipe yang setia kepada jaringan dan kandidat, sekalipun mereka mengetahui bahwa prospek kemenangan tuan politiknya tidak begitu tinggi. Kepemilikan sumber daya dari kandidat juga bukan pertimbangan utama yang mendasari iklim kerja mereka. Singkatnya, mereka adalah tim sukses yang benar-benar loyal. Sebagian besar dari mereka biasanya dimotivasi oleh afinitas ideologis dan antusiasme kepada kandidat tertentu, baik itu dilaterbelakangi oleh kepribadian kandidat maupun program-program yang ditawarkan.

b. *Clientelist Brokers*

Broker klientelis merupakan mereka yang memiliki orientasi utama untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kandidat atau pendukung intinya guna mendapatkan keuntungan materi setelah calon terpilih. Biasanya, mereka telah memiliki kalkulasi perhitungan yang matang, sehingga berani memutuskan untuk membersamai kandidat sampai dengan akhir kontestasi. Mereka yakin bahwa tuan politik mereka memiliki prospek kemenangan yang cukup bagus. Setelah kandidat terpilih, para *broker* klientelis akan menagih janji imbalan dari kinerja mereka selama kampanye. Kalaupun wujud imbalan itu tidak berbentuk materi secara langsung, jabatan politik dan akses ke sumber daya negara juga merupakan balas jasa yang dianggap bernilai sepadan bagi mereka.

c. *Opportunist Brokers*

Broker oportunist sebenarnya hampir sama dengan *broker* klientelis dari segi motivasi, yakni didasari atas pertimbangan materil. Hanya saja, mereka mengharapkan imbalan itu dalam kerangka waktu yang lebih singkat atau instan. Mereka memanfaatkan momen kampanye sebagai ladang untuk menuai imbalan langsung. Ada anekdot yang mereka gambarkan dengan lugas. Pemilu pada dasarnya dimaknai oleh mereka sebagai sarana untuk “mencari uang”, karena pemilu adalah “musim uang” (Aspinall & Rohman, 2017). Wujud konkrit penarikan imbalan langsung versi mereka cukup beragam. Mulai dari meminta kepada kandidat secara langsung untuk alasan biaya makan, transportasi, proposal, dan sejenisnya, sampai dengan memangkas anggaran yang seharusnya disalurkan kepada calon pemilih. Bahkan, beberapa di antara mereka tak jarang bermain dengan manuver dua kaki, yakni tidak hanya mendukung satu kandidat, tetapi juga secara diam-diam menyelinap menjadi *broker* dari kandidat lain untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Berdasarkan uraian tentang tipologi *broker* di atas, masalah loyalitas menjadi persoalan utama yang sering dikhawatirkan oleh kandidat. Dua bentuk pengkhianatan yang paling sering terjadi adalah predasi dan pembelotan (Aspinall, 2014). Predasi adalah suatu kondisi di mana *broker* memangsa dan menyalahgunakan sumber daya kandidat yang seharusnya ditujukan untuk pemilih atau anggota jaringan tingkat bawah. Sedangkan pembelotan merupakan pengkhianatan *broker* dengan cara meninggalkan satu kandidat demi kandidat lainnya.

Sebelum sampai pada penjelasan lebih dalam mengenai predasi dan pembelotan, penting diperhatikan terlebih dahulu dua faktor besar yang melatarbelakangi bentuk-bentuk pengkhianatan tersebut. Kedua faktor itu adalah kepemilikan sumber daya materil dan prospek kemenangan kandidat. Sumber daya materil yang akan dialokasikan kandidat untuk kampanye sangat berpengaruh bagi perilaku *broker*. Kekayaan materil berperan seperti “tiket masuk” dalam sebuah kontestasi. Namun, kandidat yang mencurahkan sumber daya materil secara besar-besaran juga belum tentu menang apabila tidak pandai membaca situasi dan kurang cakap memainkan strategi. Untuk itu, faktor kedua berupa perhitungan potensi atau prospek kemenangan kandidat juga sangat penting bagi para *broker*. Penjelasananya tertuang dalam rumus di bawah ini:

Gambar 1.1.

Rumus Predasi dan Pembelotan

RESOURCES & PROSPECTS	Prospect Weak	Prospect Strong
Resource Rich	High Predation	Low Predation
Resource Poor	Defection	Loyalty

Sumber: Temuan Riset Aspinall (2014)

Predasi sangat mungkin terjadi pada kandidat yang memiliki kekayaan sumber daya materil, namun prospek kemenangannya lemah. Sebaliknya, bagi kandidat yang sumber daya materilnya melimpah dan prospek kemenangannya kuat, maka kemungkinan terjadinya predasi sangat kecil. Dalam situasi yang memungkinkan terjadinya predasi tinggi, para *broker* sudah memikirkan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa memperoleh manfaat yang besar dari potensi pekerjaan layanan publik, proyek konstruksi, atau imbalan lain setelah pemilihan. Maka dari itu, memakan jatah distribusi manfaat yang ditujukan kepada calon pemilih menjadi alternatif untuk menghimpun keuntungan. Bahkan, *broker* klientelis sekalipun boleh jadi akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan *broker* oportunistis dalam menggelapkan sumber daya jika mereka yakin bahwa kandidat mereka akan kalah. Logika lain yang dipakai oleh tim sukses predator adalah mereka skeptis dengan imbalan yang bersifat tidak ril. Bagi mereka, keuntungan jangka pendek mesti dikejar selagi ada kesempatan, karena belum tentu kandidat akan mengingat mereka setelah pemilihan usai. Struktur jaringan yang dibangun secara *ad hoc* dari bawah bisa sangat rentan terkena manipulasi dan predasi jika sistem kontrolnya lemah.

Sementara itu, pembelotan sangat mungkin terjadi pada situasi di mana kandidat hanya memiliki sedikit sumber daya materil dan prospek kemenangannya rendah. Sedangkan ketika kandidat memiliki prospek kemenangan yang tinggi, meskipun sumber daya materilnya rendah tak menjadi soal. Mereka yang membelot biasanya bukan anggota tim sukses yang berada di piramida puncak jaringan. Sebaliknya, pembelot kebanyakan berasal dari piramida tingkat bawah yang

ditugaskan untuk memobilisasi massa di tingkat terkecil dalam struktur jaringan. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan massa yang cair, sehingga tak jarang dari kandidat lain juga berusaha untuk mendekati mereka dengan menawarkan akses ke jejaring sosial yang lebih menjanjikan. *Broker* level menengah biasanya membelot ketika mereka menyadari kandidat alternatif menawarkan prospek yang lebih besar.

1.5.2. Membangun Jaringan Pemenangan

Mengingat kompleksnya persoalan loyalitas jaringan, banyak pihak mengakui bahwa sebuah jaringan pemenangan perlu dibangun dalam kerangka yang kokoh sebelum bekerja di medan kontestasi. Adanya jaringan yang berperan sebagai penghubung antara kandidat dengan konstituen tidak serta merta terbentuk begitu saja. Diperlukan sebuah cara atau strategi yang tepat untuk membangun jaringan pemenangan yang solid. Terlebih dalam konteks kemenangan seorang kandidat perempuan yang memiliki *gap* dengan konstituen pada kontestasi politik di tingkat akar rumput, hadirnya jaringan merupakan jembatan strategis dalam menambal *gap* tersebut.

Jika kebanyakan penelitian berfokus pada strategi kemenangan yang digunakan oleh kandidat, maka lensa pandang ini akan menyuguhkan satu perspektif berbeda yang tidak kalah penting, yakni menyorot bagaimana kandidat perempuan tersebut memainkan strategi membangun jaringan sehingga mampu mengantarkannya menjadi pemenang kontestasi. Strategi menjadi penting untuk menghubungkan kandidat dengan rekan, kolega, atau akses-akses di sekitarnya dalam rangka memaksimalkan kontak-kontak yang terhubung, lalu menghimpunnya ke dalam sebuah jaringan pemenangan. Meminjam istilah yang

dipakai oleh Burt (1992), Obstfeld (2005), dan Lingo & O'Mahony (2010), strategi membangun jaringan pemenangan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga, yakni *tertius gaudens*, *tertius iungens*, dan model kolaborasi.

1. *Tertius Gaudens*

Burt (1992) menganalogikan strategi *tertius gaudens* dengan pengandaian “*the third who benefits*” atau pihak ketiga yang mendapat keuntungan. Seseorang yang bermain dengan strategi *tertius gaudens* mengambil peran sebagai posisi tengah di antara pihak-pihak yang belum terhubung atau berselisih untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya pribadi. Artinya, logika terbentuknya jaringan baru dengan menggunakan strategi ini diawali dari adanya *structural holes* yang tidak terhubung. Aktor kemudian mengelaborasi celah di antara pihak-pihak yang bersedia bernegosiasi, dengan catatan memiliki sumber daya yang cukup sebanding untuk melihat preferensi satu sama lain (Kent, Sommerdfelt, & Saffer, 2016). Akan tetapi, negosiasi dan pengintegrasian tersebut tidak akan berjalan jika mengesampingkan peran aktor tadi. Identitas mitra sengaja dikaburkan, sehingga individu atau organisasi yang menjadi perantara pertukaran dapat memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Dalam kata lain, *tertius gaudens* merujuk pada kondisi di mana potensi konflik dalam relasi antar pihak justru dimaknai sebagai arena mengambil keuntungan.

2. *Tertius Iungens*

Inti gagasan *tertius iungens* sebenarnya tidak menegasikan premis dari *tertius gaudens* yang memandang bahwa diperlukan pihak yang menghubungkan antar aktor karena adanya *structural holes* dan akan mendapatkan manfaat dalam

terbentuknya jaringan. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Obstfeld (2005), ia menemukan perbedaan *tertius iungens* dari *tertius gaudens* terdapat pada sifat. Alih-alih menjadi pihak ketiga yang diuntungkan, *tertius iungens* menyatukan jaringan yang tidak terhubung dengan sifat sama-sama menguntungkan. Orientasi *tertius iungens* lebih menekankan pada kerjasama dan kolaborasi dibandingkan kompetisi. Dalam berbagai kasus, peran moderasi dari *tertius iungens* mampu mengombinasikan ulang arus informasi dalam jaringan dan peran strategis individu untuk memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang lebih efektif (Llopis, D'Este, & Diaz-Faes, 2021).

3. Model Kolaborasi

Lingo & O'Mahony (2010) mengatakan bahwa *tertius gaudens* dan *tertius iungens* masing-masing bukanlah opsi tunggal, tetapi setiap aktor dapat memainkan kedua strategi secara fleksibel, baik bersamaan atau bergantian sesuai kebutuhan. Sebab, menurut Lingo & O'Mahony (2010), kedua strategi tersebut memiliki titik optimum apabila dikombinasikan. Temuan risetnya menemukan bahwa dalam suatu kerja kreatif, aktor bergerak dalam empat fase berbeda, yakni: 1) Pengumpulan sumber daya; 2) Melingkupi antarmuka proyek; 3) Produksi kreatif; dan 4) Sintesis akhir.

Dalam fase pertama, aktor memainkan strategi *tertius iungens* untuk merajut jaringan generatif dan membangun legitimasi proyek. Pada fase kedua, strategi *tertius gaudens* dan *tertius iungens* dimainkan secara bersamaan dalam rangka menyatukan pihak-pihak yang akan terlibat, namun dengan berbagai catatan yang tidak boleh dilanggar. Di fase ketiga, strategi *tertius gaudens* lebih dominan

dimainkan untuk mencegah ambiguitas pada saat mengatur medan kerja dan mempertegas arah gerak. Lalu pada tahap sintesis akhir, keterbukaan arus informasi lebih diperluas dengan strategi *tertius iungens* agar berbagai macam pandangan dapat diakomodir secara lebih komprehensif ketika bergerak lebih jauh.. Dengan demikian, *tertius gaudens* lebih berperan mengurangi ambiguitas, sedangkan *tertius iungens* digunakan untuk membina keselarasan (Lingo & O'Mahony, 2010).

1.5.3. Politik Gender dan Jaringan

Reduksi pemaknaan gender yang keliru berimplikasi pada munculnya ketidakadilan gender (*gender inequqlities*). Dalam kaitannya dengan struktur masyarakat, *gender inequalities* turut berdampak pada ketidakadilan lainnya yang lebih luas. Konsep gender seyogyanya berbeda dengan konsep seks atau jenis kelamin. Seks merujuk pada penyifatan manusia secara biologis yang sifatnya kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Misalnya, laki-laki adalah manusia dengan ciri-ciri memiliki jakun dan memproduksi sperma. Perempuan adalah manusia yang memiliki rahim dan memproduksi sel telur. Sifat biologis ini tidak berubah atau dalam kata lain sudah ketentuan dari Tuhan. Sedangkan konsep gender merupakan penyifatan manusia yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial maupun kultural (Fakih, 2022). Penyifatan ini bisa dipertukarkan dan bisa berubah dari waktu ke waktu, dan tidak sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, atau dari kelas yang satu dengan kelas yang lainnya.

Konstruksi sosial dan kultural yang memandang laki-laki sebagai makhluk rasional, perkasa, kuat, dan tangguh, sedangkan perempuan kerap dianggap sebagai makhluk yang irasional, lemah lembut, cantik, dan keibuan berimplikasi pada

pemisahan yang tajam antara ranah publik dan ranah domestik. Laki-laki sering dinilai lebih cakap tampil di ruang publik. Kemudian pekerjaan rumah seperti mengurus anak, bersih-bersih, dan memasak sangat lekat sebagai urusan perempuan. Bahkan, hal semacam ini dianggap sebagai kodrat. Sebenarnya, pembagian urusan publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan bukanlah perkara utama yang diperdebatkan. Titik poinnya adalah perbedaan gender (*gender differences*) tersebut melahirkan manifestasi ketidakadilan yang lebih luas seperti *stereotype*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan.

Subordinasi memposisikan perempuan sebagai makhluk yang derajatnya berada di bawah laki-laki. Implikasi ini muncul akibat konstruksi sosial dan kultural yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk irasional dan emosional, sehingga ia dipandang tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Fenomena ini lazim dijumpai dalam dunia politik. Walaupun wacana kesetaraan gender belakangan ini ramai dibicarakan, tetapi dalam realitanya masih sedikit perempuan yang berhasil menembus hambatan-hambatan kontestasi politik. Perempuan berada pada satu dunia yang disebut sebagai *exchangeable role* (Elizabeth, 2018). Di satu sisi, ia hidup dalam zaman di mana nilai-nilai baru mulai diterapkan. Tetapi di sisi lain, nilai-nilai lama dengan kultur yang sedemikian patriarki masih menjadi bayang-bayang penghambat kesetaraan dan kemajuan.

Anggapan bahwa dunia politik merupakan arena laki-laki semakin diperkuat dengan alur berpikir yang memandang bahwa politik adalah kejam, penuh intrik, dan tak jarang menjadi tempat beradu untuk berebut kekuasaan (Mahsun,

Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Logika berpikir semacam ini kian memarginalkan perempuan karena label yang tersemat dalam diri seorang perempuan adalah feminim, lemah lembut, dan tersubordinasi atas stereotip maskulinitas laki-laki. Komposisi elit politik yang lebih didominasi oleh laki-laki pada kenyataannya juga mengakibatkan representasi perempuan yang siap berkontestasi minim jumlahnya. Dengan berbagai alasan, mereka menganggap bahwa perempuan belum cukup mumpuni dan kurang memiliki daya tawar yang kuat untuk diikutsertakan dalam arena pertarungan politik. Keputusan ini berimplikasi terhadap *output* gender dalam politik yang tidak proporsional.

Dalam sebuah penelitian, politik gender berkorelasi dengan studi jaringan di mana jaringan memainkan fungsi yang penting untuk menyokong keterpilihan seorang kandidat perempuan (Umagapi, 2020). Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekuatan jaringan yang mendukung terpilihnya kandidat perempuan biasanya dimotori oleh aktor laki-laki. Para perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi tidak lepas dari peran penting patron laki-laki yang memiliki pengaruh di masyarakat dan berhasil memobilisasi jaringannya secara efektif. Meminjam antitesis dari Teori *Housewifization* Maria Mies, Konsep Ibuisme telah memberikan sumbangsih pemikiran tentang perempuan yang tidak hanya didukung dalam kapasitas sebagai seorang “ibu”, tetapi juga didefinisikan dalam arti tersebut. Artinya, perempuan belum bisa eksis atas dirinya sendiri. Ia selalu berada dalam hubungannya dengan sesuatu (keluarga, komunitas, negara) atau seseorang (anak, suami, bapak) yang biasanya identik dengan laki-laki atau sifat maskulin (Suryakusuma, 2021).

Tesis dan antitesis tersebut kemudian menjadi suatu sintesis yang dalam bahasa Julia Suryakusuma disebut sebagai ibuisme negara. Ibuisme negara merupakan ideologi gender yang sifatnya sangat membatasi, sehingga memunculkan jenjang hierarki dan lambat laun menjadi stereotip dalam masyarakat. Ideologi ini menggiring perempuan menuju “domestikasi” yang melibatkan penjinakan, segregasi, serta depolitisasi (Suryakusuma, 2021). Ibuisme negara kemudian bertransformasi menjadi bentuk baru karena memasukkan unsur kemandirian perempuan untuk memainkan peran di ranah publik atau disebut sebagai neo-ibuisme (Kabullah & Fajri, 2021). Jadi, para perempuan yang berani tampil di medan kontestasi pun masih memanfaatkan slogan serta peran tradisionalnya sebagai seorang “ibu”. Mobilisasi jaringan dari patron laki-laki, perluasan basis massa politik, glorifikasi tentang isu perempuan, hingga pemanfaatan sumber daya negara seperti PKK menjadi modal yang ampuh sebagai amunisi untuk bertarung.

Sejatinya, orientasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu kepentingan praktis gender (*practical gender interest*) dan kepentingan strategis gender (*strategic gender interest*) (Dewi, Aziz, & Raharjo, 2020). Konsep *gender interest* ala Maxine Molyneux menyebutkan bahwa kepentingan praktis gender berhubungan dengan ketercapaian dan optimalisasi tujuan beserta *output* yang dihasilkan atas keterlibatan perempuan. Sedangkan kepentingan strategis gender berusaha untuk merekonstruksi peran perempuan dalam struktur masyarakat yang kerap kali ter subordinasi sehingga dapat mewujudkan tatanan yang seimbang dan berkeadilan gender.

Dalam kaitannya dengan kandidat perempuan yang berkontestasi di panggung Pilkadaes, *gender interest* dapat dicapai dengan mekanisme kontestasi yang sehat, inisiatif untuk menciptakan program dan kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan dan anak, serta mendorong terwujudnya visi keadilan berkelanjutan dengan cara memulai perubahan untuk berpihak pada kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Sebab, representasi figur perempuan di ranah politik lokal akan berpengaruh terhadap eksistensi perpolitikan di ranah yang lebih tinggi.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1.

Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Jaringan Pemenangan	Aktor-aktor yang saling terhubung dan memiliki kesamaan tujuan untuk mensukseskan atau memenangkan kandidat dalam Pilkadaes.	<ul style="list-style-type: none"> - Jejaring Pengaruh (kerabat, tokoh agama, tokoh masyarakat) - Jejaring Manfaat (birokrasi desa, kelompok ekonomi)
<i>Broker</i>	Penyetaraan istilah untuk menyebut tim sukses, makelar politik, <i>pecut</i> , atau penyebutan sejenis. Merupakan bagian dari jaringan yang bertugas untuk membantu pemenangan kandidat, terutama selama periode kampanye.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Broker</i> aktivis (loyalis kandidat) - <i>Broker</i> klientelis (orientasi keuntungan materil atau politis jangka panjang) - <i>Broker</i> oportunistis (orientasi keuntungan materil jangka pendek)

Strategi Membangun Jaringan	Suatu cara yang digunakan oleh kandidat untuk berjejaring atau membangun relasi dengan aktor-aktor lain yang memiliki kesamaan tujuan, yakni kemenangan kandidat dalam Pilkadaes.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tertius gaudens</i> (menjadi pihak ketiga yang diuntungkan) - <i>Tertius iungens</i> (menghubungkan dengan kerjasama) - Model kolaborasi (fleksibel, bisa menggabungkan keduanya)
-----------------------------	---	--

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode kualitatif dipilih sebagai model pendekatan yang digunakan untuk memahami pokok persoalan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif menekankan pemberian makna dan interpretasi peneliti sebagai penafsiran yang didapat dari fakta empiris serta data yang relevan. Penelitian ini memusatkan cara pandang melalui observasi praktis sosial dan studi pustaka atas suatu fenomena yang terjadi. Penalaran dilakukan secara induktif dengan menganalisis data-data untuk memperoleh konklusi empiris lalu digunakan sebagai acuan menarik kesimpulan. Mazhab naturalisme sebagai titik pijak pendekatan kualitatif menuntut peneliti berpikir secara holistik (Moeloeng, 2013). Tipe penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk menangkap suatu fenomena dengan cara memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pokok bahasan yang diangkat dalam tulisan, relevan dengan tujuan penelitian ini.

Rancangan penelitian studi kasus dipilih sebagai kerangka untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian dengan memfokuskan studi pada Pemilihan Kepala Desa Pamutih Tahun 2018. Sesuai dengan ciri-cirinya, pendekatan studi kasus akan menghasilkan penelitian yang spesifik dan mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dalam waktu tertentu. Selain itu, studi kasus juga dipandang sebagai metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan “*how*” dan “*why*” dalam penelitian (Yin, 2008). Rancangan penelitian studi kasus relevan dengan tulisan ini karena mampu mengeksplorasi gambaran yang lebih terperinci mengenai suatu fenomena.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Desa Pamutih merupakan desa dengan jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Ulujami pada Gelombang VIII Pilkades serentak Kabupaten Pemalang 2018. Desa Pamutih mendapat giliran di Gelombang VIII Pilkades yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2018. Bersamaan dengan tanggal tersebut, sebanyak 13 desa lainnya di Kecamatan Ulujami dan 4 desa di Kecamatan Comal juga menggelar Pilkades serentak.

1.7.3. Informan Penelitian

Informan yang akan dimintai data ataupun keterangan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yakni pertimbangan atas kriteria tertentu dengan rasionalisasi bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan informasi yang cukup sesuai kebutuhan penelitian. Teknik *snowball sampling* juga diterapkan dalam penelitian ini, karena memungkinkan untuk menjangkau calon informan lainnya

yang diharapkan dapat melengkapi data dan keterangan dari informan sebelumnya. Berdasarkan kriteria di atas, orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Daftar Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Kepala Desa Terpilih	Purwati	Kepala Desa Pamutih 2018 – 2024
2.	Ketua Tim Sukses	Purwanto	Pemilik <i>Showroom</i> Ayu Motor
3.	Ketua Pilkades 2018	Sirlani	Ketua RW. 03 Desa Pamutih
4.	Sekretaris Pilkades 2018	Tosirin	Kasi Pemerintahan Desa Pamutih
5.	Tokoh Masyarakat, Korlap/Kordes Timses Purwati	Herman Kustino	Anggota BPD Pamutih
6.	Tokoh Masyarakat, Kordus Kiyong	Setiyadi	Anggota BPD Pamutih
7.	Masyarakat Desa Pamutih	M. Irfansyah	Mahasiswa
8.	Calon Kades Pamutih 2012	Sucipto	Sekretaris Desa Pamutih

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif menggunakan data dalam bentuk kata-kata tertulis, teks, frasa atau simbol-simbol yang merepresentasikan orang, tindakan, serta

peristiwa pada suatu fenomena sosial. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

- a) Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada informan penelitian.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan pengumpulan dokumen pendukung.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penelitian adalah menyoal bagaimana penulis mengumpulkan data, karena data yang dikumpulkan akan menentukan sejauh mana keabsahan serta validitas tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yang umum digunakan pada pengumpulan data kualitatif. Beberapa teknik tersebut adalah:

- a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara interaksi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dijadikan informan penelitian. Keterangan yang didapat dari narasumber dapat digunakan sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan penulis untuk menggali informasi kepada informan yang mengetahui dinamika kontestasi Pilkades Pamutih saat itu. Wawancara dilakukan secara langsung, *by phone*, dan *by chat* mengingat beberapa kondisi di lapangan kurang memungkinkan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui sumber lain yang relevan dengan penelitian. Beberapa cara yang dilakukan antara lain dengan mendokumentasikan berkas-berkas atau data-data pendukung yang berupa *hard file* dan mengumpulkan salinan data jika berupa *soft file*. Teknik ini sering dilakukan pada banyak penelitian karena dapat mempermudah peneliti untuk mengakomodir dan menyimpan banyaknya data.

c) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah deretan aktivitas untuk mengumpulkan data dari literatur yang telah tersedia, dengan catatan bahwa literatur itu merupakan sumber yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Referensi yang didapat dari studi pustaka dapat dijadikan landasan untuk memperkuat penggalan jawaban atas pertanyaan penelitian. Penulis mendapatkan referensi dari hasil membaca dan mencatat poin-poin penting dalam buku, jurnal, artikel, berita, dan penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa *hard file* maupun *soft file*.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh di lapangan dan sumber pendukung belum tentu semuanya relevan dengan pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian. Maka dari itu, kejelian peneliti ketika mengorganisasikan data sangat penting dan berpengaruh pada proses interpretasi atau pemberian makna. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan analisis data dalam metode kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga tuntas (Miles & Huberman, 1984).

Tahapan-tahapan analisis data tersebut antara lain adalah *data reduction*, *data display*, dan *making conclusion*. *Data reduction* atau reduksi data adalah tahapan ketika penulis melakukan seleksi data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan mengesampingkan data yang kurang relevan. *Data display* merupakan proses untuk menyinkronkan data-data terpilih agar diperoleh keselarasan dalam menjawab pokok permasalahan penelitian. Kemudian *making conclusion* atau proses menarik kesimpulan menjadi tahapan terakhir sebagai wahana penulis untuk memberikan makna atau interpretasi dari temuan penelitian berdasarkan data-data yang telah diorganisasikan.

1.7.7. Kualitas Data

Kualitas data dan ketepatan metode merupakan dua indikator penting yang menandai validitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, validitas dimaknai sebagai upaya memeriksa akurasi hasil penelitian melalui serangkaian penerapan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2009). Suatu data dapat dikatakan sebagai data yang valid apabila informasi yang diperoleh peneliti dari informan dan sumber-sumber terkait tidak memiliki perbedaan atau distingsi dengan realitas yang terjadi di lapangan. Artinya, kesesuaian antar sumber menandai kebenaran dari suatu data maupun informasi.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan sebagai prosedur untuk mengecek validitas data. Triangulasi data (*triangulate*) merupakan teknik untuk memeriksa data-data agar terbukti keabsahannya dengan melakukan pengecekan kembali setelah memperoleh data. Pengecekan itu bisa dilakukan melalui *crosscheck* dari sumber lain, seperti instansi atau pihak yang kredibel, terlibat, atau

mengetahui informasi dan proses di mana data didapatkan. Dengan kata lain, kekayaan sumber dari seorang peneliti menjadi salah satu kunci untuk dapat menganalisis secara komprehensif. Cara yang dilakukan peneliti untuk melakukan triangulasi data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Melakukan *in-depth interview* kepada informan.
- 2) Melakukan uji silang data yang didapatkan dari informan dengan temuan di lapangan.
- 3) Melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil informasi melalui narasumber lain ataupun sumber-sumber lain yang relevan.